



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**PROGRAM
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
KEGIATAN
PEMBINAAN BADAN KERJASAMA ANTAR NAGARI**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan kegiatan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari adalah Kegiatan yang membina Dana Bergulir Masyarakat yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) setelah berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Nasional yang berakhir pada tahun 2014.

Badan Kerjasama Antar Nagari adalah Badan yang dibentuk dan ditetapkan dalam Musyawarah Antar Nagari dengan Surat Keputusan Bersama Wali Nagari, adapun Fungsi dari Badan Kerjasama Antar Nagari adalah :

- a. perumusan rencana kerja sama antar Nagari;
- b. penyiapan bahan rancangan produk hukum nagari terkait kerjasama antar-Nagari;
- c. penjabaran Peraturan Bersama Wali Nagari tentang kerja sama Nagari ke dalam program dan rencana kerja BKAN;
- d. pelaksanaan Program dan rencana kerja BKAN;
- e. memberikan masukan dan saran kepada Wali Nagari mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan;
- f. penanganan masalah-masalah akibat pelaksanaan kerja sama antar Nagari;
- g. pelestarian dan pengembangan hasil-hasil kerja sama antar Nagari;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja sama antar Nagari; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Nagari melalui forum Musyawarah Antar Nagari.

Dilihat dari fungsi tersebut diatas, maka Badan Kerjasama Antar Nagari sangat berperan penting dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan disuatu wilayah atau ditingkat antar nagari, tapi peran dan Fungsi Kelembagaan tidak berjalan sebagai mana mestinya. Hal ini disebabkan karena regulasi untuk penguatan Kelembagaan BKAN belum ada ditingkat daerah.

Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada setiap kecamatan telah berjalan cukup baik. Dari 15 Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat yang berada di Kecamatan, ada 1 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang kondisi 31 Desember 2019 tidak aktif lagi yaitu UPK Kecamatan Bayang. Hal ini disebabkan banyaknya tunggakan kelompok dan tidak jelas dalam hal pelaporan pertanggungjawab. dari 15 UPK ada 7 UPK yang telah membentuk Badan Perkumpulan yang dikuatkan dengan Akta Notaris yaitu UPK IV Nagari Bayang Utara, UPK IV Jurai, UPK Kec. Batang Kapas, UPK Ranah Pesisir, UPK Linggo Sari Baganti, UPK Airpura dan UPK Pancung Soal. Dan satu UPK yang telah bergabung dengan BUMNag Bersama yaitu UPK Sutera. Adapun Jumlah Dana Bergulir Masyarakat yang beredar di Kabupaten Pesisir Selatan Kondisi 31 Desember 2019 sebesar Rp. 49 Milyar Lebih.

1.2 Kegiatan yang dilaksanakan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah:

- a. Pembinaan dan monitoring terhadap Unit Pengelola Kegiatan se Kabupaten Pesisir Selatan,
- b. Rapat Koordinasi Pembinaan Dana Bergulir.
- c. Pelatihan terhadap pelaku Unit Pengelola Kegiatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud dari Program pengembangan Kawasan Perdesaan pada kegiatan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari untuk membina dan melestarikan Kelembagaan pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat khususnya terhadap BKAN dan UPK sehingga kelembagaan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan Program yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan dari Program Pengembangan Kawasan Perdesaan kegiatan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari adalah :

- ✓ Dana Bergulir Masyarakat yang dikelola UPK tepat sasaran

- ✓ Pengelola Dana Bergulir Masyarakat dapat mempedomani aturan yang ada dan tidak keluar dari Petunjuk Teknis Operasional (PTO X) tentang Pengelolaan dana Bergulir.
- ✓ Berperan aktif kembali Kelembagaan Badan Kerjasama Nagari

1.4 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan program pengembangan kawasan perdesaan kegiatan kegiatan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari dilaksanakan selama 1 tahun anggaran yaitu dari tanggal 1 Januari s.d tanggal 31 Desember 2020.

1.5 Dasar Program dan Kegiatan

Adapun Dasar dari pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan kegiatan kegiatan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari adalah :

- ✓ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- ✓ Surat DPPMD Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan pengakhiran serta penataan dan pengalihan kepemilikan aset hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
- ✓ Keputusan Bupati Nomor : 709/26/Kpt/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun anggaran 2020
- ✓ Keputusan Dinas PMDPP dan KB tahun anggaran 2020 Nomor: 410/02/SK/DPMDPPKB-PS/2020 tanggal 9 januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun anggaran 2020.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Badan Kerjasama Antar Nagari sangat berperan penting dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan disuatu wilayah atau ditingkat antar nagari, tapi peran dan Fungsi Kelembagaan tidak berjalan sebagai mana mestinya. Hal ini disebabkan karena regulasi untuk penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Nagari belum ada ditingkat daerah.

Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan, dan adapun jumlah aset yang dikelola pada tahun 2019 sebesar Rp. 49 Milyar lebih yang tersebar di 15 UPK se Kabupaten Pesisir Selatan.

2.1 Pembinaan dan monitoring terhadap Unit Pengelola Kegiatan se Kabupaten Pesisir Selatan

1) Kecamatan Koto XI Tarusan

Pembinaan UPK Kecamatan Koto XI Tarusan telah dilaksanakan sebanyak 3 kali, pembinaan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan dana yang dikelola UPK dan perkembangan kelompok dalam hal pengembalian pinjaman. Adapun hasil pembinaan di Kecamatan Koto XI Tarusan sebagai berikut :

- ✓ Jumlah Kelompok Tahun 2017 sebanyak 102 kelompok SPP, Tahun 2018 sebanyak 111 Kelompok SPP dan 5 Kelompok UEP, dan Desember 2019 sebanyak 118 Kelompok SPP.
- ✓ Jumlah Surplus UPK tahun 2017 sebesar Rp. 83.927.440,- tahun 2018 sebesar Rp. 66.859.982,- dan Kondisi Desember 2019 sebesar Rp. 33.967.628,-

2) Kecamatan Bayang

Pembinaan UPK Kecamatan Bayang telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, pembinaan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan dana yang dikelola UPK dan perkembangan kelompok dalam hal pengembalian pinjaman. Adapun hasil pembinaan di Kecamatan Bayang sebagai berikut :

- ✓ Jumlah Kelompok Tahun 2017 sebanyak 213 kelompok SPP, Tahun 2018 sebanyak 213 Kelompok SPP, dan Desember 2019 sebanyak 213 Kelompok SPP.
- ✓ Jumlah Surplus UPK tahun 2017 sebesar Rp. 33.409.839,- tahun 2018 sebesar Rp. (80.373.192),- dan Kondisi Desember 2019 sebesar Rp. 0,- dan penyebab tidak adanya surplus adalah banyaknya tunggakan pada kelompok.

3) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Pembinaan UPK Kecamatan IV Nagari Bayang Utara telah dilaksanakan sebanyak 6 kali, pembinaan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan dana yang dikelola UPK dan perkembangan kelompok dalam hal pengembalian pinjaman. Adapun hasil pembinaan di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagai berikut :

- ✓ Jumlah Kelompok Tahun 2017 sebanyak 75 kelompok SPP, Tahun 2018 sebanyak 73 Kelompok SPP, dan Desember 2019 sebanyak 73 Kelompok SPP.
- ✓ Jumlah Surplus UPK tahun 2017 sebesar Rp. 59.516.577,- tahun 2018 sebesar Rp. 18.890.336,- dan Kondisi Desember 2019 sebesar Rp. 4.212.873,-

4) Kecamatan IV Jurai

Pembinaan UPK Kecamatan IV Jurai belum dilaksanakan karena terbatasnya anggaran pembinaan tersebut. Perkembangan dana yang dikelola UPK dan perkembangan kelompok dalam hal pengembalian pinjaman dilihat dari laporan tahunan per desember 2019. Adapun hasil pembinaan di Kecamatan IV Jurai sebagai berikut :

- ✓ Jumlah Kelompok Tahun 2017 sebanyak 103 kelompok SPP, Tahun 2018 sebanyak 73 Kelompok SPP, dan Oktober 2019 sebanyak 73 Kelompok SPP.
- ✓ Jumlah Surplus UPK tahun 2017 sebesar Rp. 197.283.109,- tahun 2018 sebesar Rp. 134.583.337,- dan Kondisi Desember 2019 sebesar Rp. 86.710.949,-

5) Kecamatan Batang Kapas

Pembinaan UPK Kecamatan Batang Kapas telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, pembinaan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan dana yang dikelola UPK dan perkembangan kelompok dalam hal pengembalian pinjaman. Adapun hasil pembinaan di Kecamatan Batang Kapas sebagai berikut :

- ✓ Jumlah Kelompok Tahun 2017 sebanyak 165 kelompok SPP, Tahun 2018 sebanyak 163 Kelompok SPP, dan Desember 2019 sebanyak 161 Kelompok SPP.
- ✓ Jumlah Surplus UPK tahun 2017 sebesar Rp. 243.458.338,- tahun 2018 sebesar Rp. 184.853.300,- dan Kondisi Desember 2019 sebesar Rp. 222.585.048,-

6) Kecamatan Sutera

Pembinaan UPK Kecamatan Sutera telah dilaksanakan sebanyak 1 kali, pembinaan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan dana yang dikelola UPK dan perkembangan kelompok dalam hal pengembalian pinjaman. Adapun hasil pembinaan di Kecamatan Sutera sebagai berikut :

- ✓ Jumlah Kelompok Tahun 2017 sebanyak 221 kelompok SPP sebanyak 20 kelompok UEP, Tahun 2018 sebanyak 195 Kelompok SPP dan 20 Kelompok UEP, dan Desember 2019 sebanyak 234 Kelompok SPP dan 20 kelompok UEP.
- ✓ Jumlah Surplus UPK tahun 2017 sebesar Rp. 137.022.075,- tahun 2018 sebesar Rp. 247.347.015,- dan Kondisi Desember 2019 sebesar Rp. 191.554.764

7) Kecamatan Lengayang

Pembinaan UPK Kecamatan Lengayang telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, pembinaan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan dana yang dikelola UPK dan perkembangan kelompok dalam hal pengembalian pinjaman. Adapun hasil pembinaan di Kecamatan Lengayang sebagai berikut:

- ✓ Jumlah Kelompok Tahun 2017 sebanyak 170 kelompok SPP, Tahun 2018 sebanyak 162 Kelompok SPP, dan Desember 2019 sebanyak 133 Kelompok SPP.

- ✓ Jumlah Surplus UPK tahun 2017 sebesar Rp. 433.186.464,- tahun 2018 sebesar Rp. 385.455.953,- dan Kondisi Desember 2019 sebesar Rp. 419.737.273,-

8) Kecamatan Ranah Pesisir

Pembinaan UPK Kecamatan Ranah Pesisir telah dilaksanakan sebanyak 3 kali, pembinaan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan dana yang dikelola UPK dan perkembangan kelompok dalam hal pengembalian pinjaman. Adapun hasil pembinaan di Kecamatan Ranah Pesisir sebagai berikut :

- ✓ Jumlah Kelompok Tahun 2017 sebanyak 131 kelompok SPP, Tahun 2018 sebanyak 117 Kelompok SPP, dan Desember 2019 sebanyak 84 Kelompok SPP.
- ✓ Jumlah Surplus UPK tahun 2017 sebesar Rp. 537.252.792,- tahun 2018 sebesar Rp. 506.512.646,- dan Kondisi Desember 2019 sebesar Rp. 379.400.278,-.

9) Kecamatan Linggo Sari Baganti

Pembinaan UPK Kecamatan Linggo Sari Baganti telah dilaksanakan sebanyak 1 kali, pembinaan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan dana yang dikelola UPK dan perkembangan kelompok dalam hal pengembalian pinjaman. Adapun hasil pembinaan di Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagai berikut :

- ✓ Jumlah Kelompok Tahun 2017 sebanyak 40 kelompok SPP, Tahun 2018 sebanyak 46 Kelompok SPP, dan Desember 2019 sebanyak 62 Kelompok SPP.
- ✓ Jumlah Surplus UPK tahun 2017 sebesar Rp. 211.789.006,- tahun 2018 sebesar Rp. 145.969.848,- dan Kondisi Desember 2019 sebesar Rp. 187.838.776,-

10) Kecamatan Airpura

Pembinaan UPK Kecamatan Airpura telah dilaksanakan sebanyak 1 kali, pembinaan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan dana yang

dikelola UPK dan perkembangan kelompok dalam hal pengembalian pinjaman. Adapun hasil pembinaan di Kecamatan Airpura sebagai berikut :

- ✓ Jumlah Kelompok Tahun 2017 sebanyak 116 kelompok SPP, Tahun 2018 sebanyak 115 Kelompok SPP, dan Desember 2019 sebanyak 117 Kelompok SPP
- ✓ Jumlah Surplus UPK tahun 2017 sebesar Rp. 34.750.039,- tahun 2018 sebesar Rp. 39.073.290,- dan Kondisi Desember 2019 sebesar Rp. 39.447.427,-

11)Kecamatan Pancung Soal

Pembinaan UPK Kecamatan Pancung Soal telah dilaksanakan sebanyak 1 kali, pembinaan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan dana yang dikelola UPK dan perkembangan kelompok dalam hal pengembalian pinjaman. Adapun hasil pembinaan di Kecamatan pancung Soal sebagai berikut :

- ✓ Jumlah Kelompok Tahun 2017 sebanyak 169 kelompok SPP, Tahun 2018 sebanyak 87 Kelompok SPP, dan Desember 2019 sebanyak 56 Kelompok SPP.
- ✓ Jumlah Surplus UPK tahun 2017 sebesar Rp. 118.587.355,- tahun 2018 sebesar Rp. 73.308.300,- dan Kondisi Desember 2019 sebesar Rp. 26.487.550,-

12)Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Pembinaan UPK Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah dilaksanakan sebanyak 1 kali, pembinaan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan dana yang dikelola UPK dan perkembangan kelompok dalam hal pengembalian pinjaman. Adapun hasil pembinaan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagai berikut :

- ✓ Jumlah Kelompok Tahun 2017 sebanyak 31 kelompok SPP, Tahun 2018 sebanyak 26 Kelompok SPP, dan Desember 2019 sebanyak 28 Kelompok SPP.
- ✓ Jumlah Surplus UPK tahun 2017 sebesar Rp. 13.168.739,- tahun 2018 sebesar Rp. 3.643.560,- dan Kondisi Desember 2019 sebesar Rp. 13.504.141,-

13)Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

Pembinaan UPK Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan telah dilaksanakan sebanyak 1 kali, pembinaan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan dana yang dikelola UPK dan perkembangan kelompok dalam hal pengembalian pinjaman. Adapun hasil pembinaan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagai berikut :

- ✓ Jumlah Kelompok Tahun 2017 sebanyak 50 kelompok SPP, Tahun 2018 sebanyak 50 Kelompok SPP, dan Desember 2019 sebanyak 69 Kelompok SPP.
- ✓ Jumlah Surplus UPK tahun 2017 sebesar Rp. 0,- tahun 2018 sebesar Rp. 0,- dan Kondisi Desember 2019 sebesar Rp. (1.057.954),-.

14)Kecamatan Lunang

Pembinaan UPK Kecamatan Lunang telah dilaksanakan sebanyak 1 kali, pembinaan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan dana yang dikelola UPK dan perkembangan kelompok dalam hal pengembalian pinjaman. Adapun hasil pembinaan di Kecamatan Lunang sebagai berikut :

- ✓ Jumlah Kelompok Tahun 2017 sebanyak 49 kelompok SPP dan 6 kelompok UEP, Tahun 2018 sebanyak 52 Kelompok SPP dan 7 Kelompok UEP, dan Desember 2019 sebanyak 54 Kelompok SPP dan 7 Kelompok UEP.
- ✓ Jumlah Surplus UPK tahun 2017 sebesar Rp. 43.238.036,- tahun 2018 sebesar Rp. 51.897.036,- dan Kondisi Desember 2019 sebesar Rp. 68.064.893,-

15)Kecamatan Silaut

Pembinaan UPK Kecamatan Silaut telah dilaksanakan sebanyak 1 kali, pembinaan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan dana yang dikelola UPK dan perkembangan kelompok dalam hal pengembalian pinjaman. Adapun hasil pembinaan di Kecamatan Silaut sebagai berikut :

- ✓ Jumlah Kelompok Tahun 2017 sebanyak 28 kelompok SPP dan 8 kelompok UEP, Tahun 2018 sebanyak 30 Kelompok SPP dan 8 Kelompok UEP, dan Desember 2019 34 Kelompok SPP dan 8 kelompok UEP.

- ✓ Jumlah Surplus UPK tahun 2017 sebesar Rp. 378.495.337,- tahun 2018 sebesar Rp. 158.159.351,- dan Kondisi Desember 2019 sebesar Rp. 150.071.762,-

2.2 Acara Sosialisasi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2019

Acara Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 27 Februari 2020 dengan hasil rapat 1) Tugas dan Fungsi BKAN harus disesuaikan dengan Permendagri No 96 tahun 2017, 2) BKAN adalah wadah kerjasama nagari untuk mewujudkan UPK dan BUMNag, 3) Penerbitan SK BKAN oleh Wali Nagari. 4) Posisi UPK dan BKAN tergantung kajian dan Keputusan bersama tetapi harus mengacu pada Peraturan yang ada, 5) BKAN adalah Pengontrol jalannya UPK. 6) Untuk Kawasan adanya Pembentukan Tim Koordinasi di kabupaten, 7) Dengan terbitnya Peraturan Bupati Pesisir akan berdampak Positif bagi nagari dalam Berkomitmen dengan satu Nagari dengan Nagari lainnya, dan akan mempermudah proses percepatan pembangunan nagari.

2.3 Anggaran dan Realisasi

Jumlah anggaran yang dikelola tahun anggaran 2020 sejumlah Rp. ~~15.089.200,-~~ dengan jumlah realisasi sebesar Rp. **15.087.200,-** atau sebesar ~~99,14%~~ dengan sisa anggaran sebesar Rp. **2.000,-**. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
1	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	3.300.000	3.300.000	0	100%
2	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.876.700	1.874.700	2.000	99%
3	Belanja Sewa sarana mobilitas darat	1.500.000	1.500.000	0	100%
4	Belanja Makan dan Minuman rapat	1.787.500	1.787.500	0	100%
5	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	6.625.000	6.625.000	0	100%
Jumlah		15.089.200	15.087.200	2.000	99%

2.4 Kendala dan Solusi

Adapun kendala dan Solusi yang dialami dalam Pelaksanaan program pengembangan kawasan perdesaan kegiatan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari yaitu :

a. Kendala

- ✓ UPK Kecamatan Bayang tidak aktif dikarenakan tingginya tingkat kemacetan, sehingga kantor UPK Kecamatan Bayang tutup.
- ✓ Belum adanya regulasi tentang pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat.

b. Solusi

- ✓ UPK Kecamatan Bayang sedang dalam penanganan Tipidkor Polres Pesisir Selatan.
- ✓ Perlunya rapat internal dengan UPK Bayang untuk mengetahui permasalahan dan penyebab tingginya kemacetan pengembalian Dana Bergulir tersebut.
- ✓ Diterbitkannya regulasi tentang pengelolaan dana bergulir.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

- 1) Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada setiap kecamatan telah berjalan cukup baik. Dari 15 Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat yang berada di Kecamatan, ada 1 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang kondisi 31 Desember 2019 tidak aktif lagi yaitu UPK Kecamatan Bayang. Hal ini disebabkan banyaknya tunggakan kelompok dan tidak jelas dalam hal pelaporan pertanggungjawab. dari 15 UPK ada 7 UPK yang telah membentuk Badan Perkumpulan yang dikuatkan dengan Akta Notaris yaitu UPK IV Nagari Bayang Utara, UPK IV Jurai, UPK Kec. Batang Kapas, UPK Ranah Pesisir, UPK Linggo Sari Baganti, UPK Airpura dan UPK Pancung Soal. dan satu UPK yang telah bergabung dengan BUMNag Bersama yaitu UPK Sutera. Adapun Jumlah Dana Bergulir Masyarakat yang beredar di Kabupaten Pesisir Selatan Kondisi 31 Desember 2019 sebesar Rp. 38 Milyar Lebih.
- 2) Jumlah Kelompok yang menggunakan Dana Bergulir Masyarakat se Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 sebanyak 1.697 Kelompok, tahun 2018 sebanyak 1.553 Kelompok dan Kondisi Desember 2019 sebanyak 1.544 kelompok.
- 3) Jumlah Dana yang digulirkan se kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 sebesar Rp. 46 Milyar lebih, tahun 2018 sebesar Rp. 44 milyar lebih dan Kondisi Desember 2019 sebesar Rp. 38 Milyar lebih.
- 4) Jumlah laba/rugi/surplus dana Bergulir Masyarakat se Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 sebesar Rp. 2.563.907.497,-, tahun 2018 sebesar Rp. 1.998.881.165, dan kondisi Desember 2019 sebesar Rp. 1.630.970.644,-.
- 5) Jumlah Neraca Dana Bergulir Masyarakat se Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 sebesar Rp. 47 Milyar Lebih, tahun 2018 sebesar Rp. 48 Milyar, dan kondisi Desember 2019 sebesar Rp. 48 Milyar Lebih.
- 6) Tingkat Kemacetan Dana Bergulir Masyarakat se Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 sebesar 17%, tahun 2018 sebesar 19% dan Kondisi Desember 2019 sebesar 22%.
- 7) Sosialisasi dilaksanakan 1 kali

3.2 Saran

Adapun saran untuk keberlanjutan Program dan Kegiatan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari adalah :

- ✓ Dengan adanya dana bergulir masyarakat yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan maka sangat perlu dibuatkan regulasi tentang pengelolaan dana bergulir
- ✓ Lebih optimalkan dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap dana bergulir tersebut, baik kunjungan ke kelompok penerima dana bergulir maupun dan pembinaan terhadap pengelola dana Bergulir tersebut.

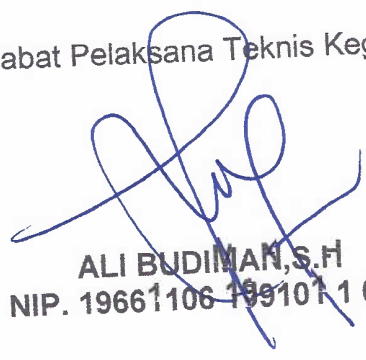
Demikianlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2020, semoga dapat dapat menjadi acuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Dra. MERY EMILVA
NIP. 19670330 199302 2 002


ALI BUDI MAN, S.H
NIP. 19661106 199101 1 001

Diketahui Oleh
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku Pengguna Anggaran


WENDI, S.H, M.Hum
NIP. 19760407 199803 1 005